

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor: 157/PSDKP.2/TU.140/I/2023

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja Periode Tahun 2022 Direktorat POA
Tanggal : 16 Januari 2023

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



Pung Nugroho Saksono

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN IV 2022**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2022.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan IV kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2022. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 16 Januari 2023
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksano, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Tahun 2022

1. Koordinator Kelompok Operasional Pusat
Pengendalian
2. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha
3. Husain, S.Kom

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2022

1. Ikrom Bungsu. S.Pi
2. Nova Roy Yohana, S.Sos
3. Ridwan Nurzaha, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha, ST
6. Noval Reza Jaya, A.Md

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	12
Maksud dan Tujuan	12
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	15
Sistematika Penyajian	16

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	18
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	18
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	20
Perjanjian Kinerja 2022	20
Pengukuran Capaian Kinerja	23

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	25
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	27
Sasaran Kegiatan 1	27
Sasaran Kegiatan 2	31
Sasaran Kegiatan 3	36
Sasaran Kegiatan 4	55
Sasaran Kegiatan 5	59
Akuntabilitas Keuangan	76

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2022	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	21
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	23
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2022	25
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Tahun 2022	28
Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Tahun 2022	29
Tabel 7. Data target dan realisasi keaktifan pokmaswas	30
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Tahun 2022	32
Tabel 9. Rincian capaian per Indikator	32
Tabel 10. Indikasi Kapal Perikanan	33
Tabel 11. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi	34
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-3 periode Tahun 2022	37
Tabel 13. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode XII-A 2022	38
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Tahun 2022	50
Tabel 15. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Tahun 2022	51
Tabel 16. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2018-2022	52
Tabel 17. Capaian Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan	52
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Tahun 2022	54
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Tahun 2022	56
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Tahun 2022	57
Tabel 21. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	58
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Tahun 2022	60
Tabel 23. Perbandingan Hasil IKM	61
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Tahun 2022	62
Tabel 25. Draft NSPK yang disusun oleh Direktorat POA	62
Tabel 26. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP	63
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Tahun 2022	63
Tabel 28. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP	64
Tabel 28. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Tahun 2022	65
Tabel 30. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP	66
Tabel 29. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2022	66

Tabel 32. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP.....	67
Tabel 30. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Tahun 2022	67
Tabel 34. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP.....	69
Tabel 31. Target dan realisasi IKU-14 periode Tahun 2022	69
Tabel 36. Perbandingan capaian IKU Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP	70
Tabel 32. Target dan realisasi IKU-15 periode Tahun 2022	71
Tabel 39. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen PSDKP.....	71
Tabel 38. Target dan realisasi IKU-16 periode Tahun 2022	72
Tabel 39. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP.....	72
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-17 periode Tahun 2022	73
Tabel 35. Tabel Capaian Nilai IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022	74
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-18 periode Tahun 2022	75
Tabel 37. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil	75
Tabel 38. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2022.....	76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.....	15
Gambar 2. Grafik capaian hasil operasi kapal pengawas kurun waktu (2018-2022).....	53
Gambar 3. Dokumentasi Pengadaan Kapal Pengawas Multi Years Contract (MYC) T.A 2022-2023.....	56
Gambar 4. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Tahun 2022	78
Gambar 5. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Tahun 2022	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Tahun 2022 sebanyak 18 IKU/IK telah memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan IV 2022 mencapai 109,12% mengalami penurunan sebesar 0,11% dari capaian triwulan tahun IV 2021 sebesar 109,23%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan persentase capaian pada empat indikator kinerja yaitu: 1) Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP menurun 4%, (2021: 120,84%, 2022: 116,66%); 2) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan menurun 23% (2021: 123,08%, 2022: 100,00%) ; 3) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA menurun 1% (2021: 117,61%, 2022: 116,28%); 4) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA menurun 5% (2021: 137,93%, 2022: 133,33%).

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA Tahun 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan yang tertuang dalam DIPA Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu awal Direktorat POA berjumlah Rp316,080,010,000,00 lalu mendapat penambahan sebesar Rp16,397,890,000,00 bersumber dari pergeseran antar Program, sehingga pagu anggaran Direktorat POA bertambah menjadi Rp332.477.900.000.

Anggaran *Automatic Adjustment* (AA) atau pencadangan anggaran lingkup Direktorat POA sebesar Rp56,843,319,000,00, anggaran tersebut pada akhir Desember 2022 telah dilakukan penarikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Akibatnya, pagu anggaran akhir Direktorat POA berkurang menjadi Rp275,634,581,000,00.

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2022 sebesar **Rp 275,251,639,208,00** atau sebesar **99,86%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode Triwulan IV 2021 yakni sebesar **99,77%**. kinerja penyerapan anggaran tersebut sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2022.

Dalam merealisasikan anggaran tersebut, Direktorat POA telah menerapkan prinsip *budget follow* program secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode Tahun 2022 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90	100	111,11
2	Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	93,33	116,66
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	95,46	103,76
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85	91,57	107,73
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	55	55,29	100,53
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	91,97	114,96

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	120	120
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	81,64	106,03
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	93,14	120,96
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	97,76	108,62
		13	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	27,18	129,43
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Inovasi)	1	1	100
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	75	100	133,33
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	75	97,19	129,59
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	100	116,28
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						109,12%

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Tahun 2022 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020-2024

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin kompleks dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 707 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleksnya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, *cloud computing*, *artificial intelligent* (AI), big data serta *Internet of Thing* (IoT).

Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 ini menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan **penangkapan ikan terukur** merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis output control (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (*while fishing*) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

ILLEGAL FISHING MASIH MARAK

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing*. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku *illegal fishing* oleh

Kapal Pengawas Perikanan. Tercatat sebanyak 18 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 79 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas sampai dengan bulan Desember 2022.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

PENGUATAN ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan *Exchange of Notes (ENs)* tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63 meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahkan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan dan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan pengiriman kapal dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023.

Sebanyak 2unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

SINERGITAS OPERASI BERSAMA

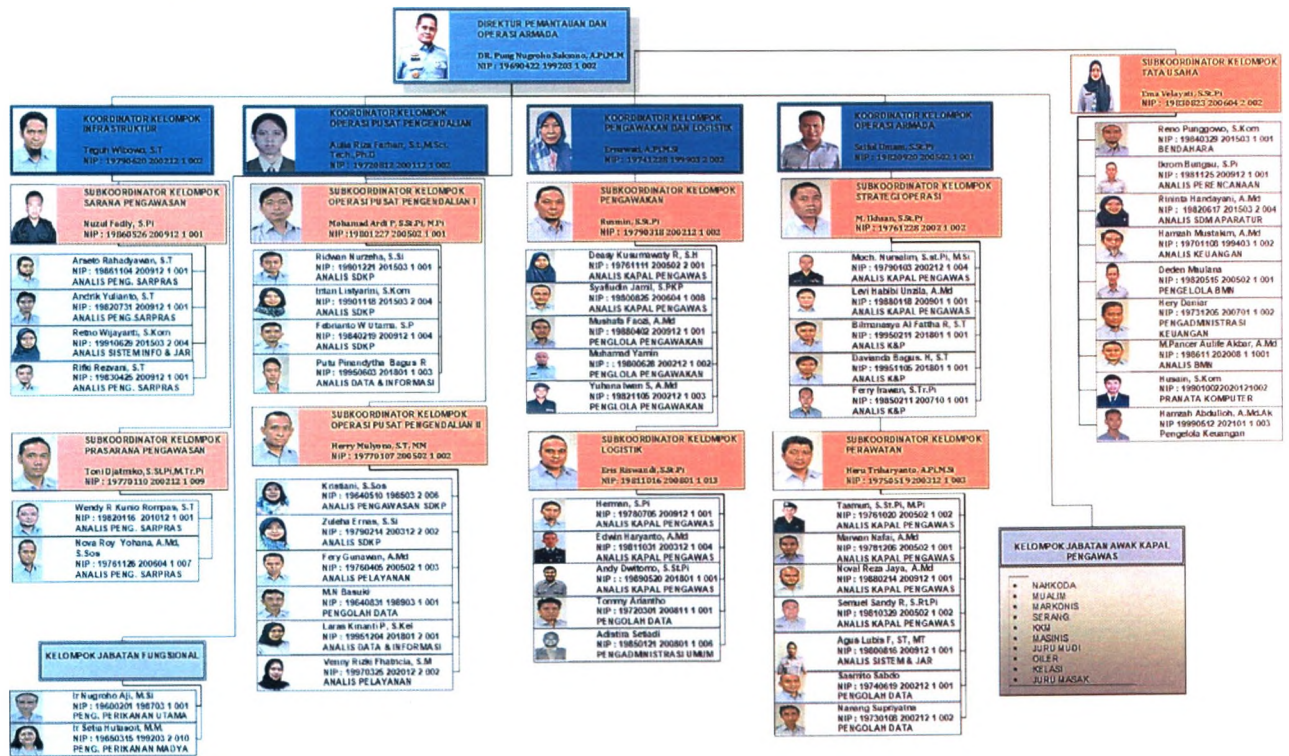
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut

seperti: *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/ Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan besar bila bersinergi.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada**
Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2022 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2022 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2022.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional;
2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
3. Speedboat Pengawas;
4. Kapal Pengawas;
5. Operasi Pesawat Patroli;
6. Operasi Kapal Pengawas;
7. Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau;
8. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau;
9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan;
10. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
11. Layanan Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2022

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdiri atas 5 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	ISK.1.1.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif (%)	90	%
SK 2.1	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	ISK 2.1.1	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	Indeks
SK 3.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK 3.1.1	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	Indeks
		ISK 3.1.2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85	Indeks
		ISK 3.1.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	Indeks
SK 4.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	ISK 4.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	55	%
		ISK 4.1.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	%
SK 5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK 5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	Indeks
		ISK 5.1.2	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	%
		ISK 5.1.3	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	Indeks

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	
		ISK 5.1.4	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	%
		ISK 5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	Nilai
		ISK 5.1.6	Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	Nilai
		ISK 5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	Inovasi
		ISK 5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		ISK 5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		ISK 5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	%
		ISK 5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	%

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2022 setelah penyesuaian dikarenakan *Automatic Adjustment* ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	1.014.000
2	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.115.166.000
3	Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	549.625.000
4	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	243.464.000
5	Operasi Kapal Pengawas	108.728.286.000
6	Operasi Pesawat Patroli	50.889.642.000
7	Kapal Pengawas	53.643.894.000
8	Speedboat Pengawas	8.919.158.000
9	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	45.607.692.000
10	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	4.936.640.000
Anggaran Direktorat POA 2022		275.634.581.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 109,12%** dengan indikator NPSS berwarna **HIJAU**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	%
SK 1.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK 1.1.1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90	100	111,11
SK 2.1	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	ISK 2.1.1	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	93,33	116,66
SK 3.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK 3.1.1	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	95,46	103,76
		ISK 3.1.2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85	91,57	107,73
		ISK 3.1.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	100
SK 4.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK 4.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	55	55,29	100,53
		ISK 4.1.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	%
			pengawasan SDKP (%)			
SK 5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK 5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	91,97	114,96
		ISK 5.1.2	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	120	120
		ISK 5.1.3	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	81,64	106,03
		ISK 5.1.4	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	93,14	120,96
		ISK 5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	97,76	108,62
		ISK 5.1.6	Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	27,18	129,43
		ISK 5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	1	100
		ISK 5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	75	100	133,33

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	%	
		ISK 5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	97,19	129,59
		ISK 5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	100	116,28
		ISK 5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaanya. Salah satu *tools* yang digunakan adalah Laporan Pembinaan Pokmaswas dari DKP Provinsi dilengkapi dengan "form keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat POA dan didistribusikan ke setiap Provinsi.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	90	100	111,11	91	100	109,89	90	100	111,11	90	100	111,11

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90 persen dengan capaian sebesar 100 persen dengan persentase capaian sebesar 111,11 persen. Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja organisasi yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat dicapai dengan maksimal. Maksimalnya capaian tersebut karena Direktorat POA senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan secara rutin pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh masing-masing Provinsi. Pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telepon komunikasi, dan *zoom*, sementara via *offline* berupa kunjungan kedinasan ke lokasi pembinaan Pokmaswas atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dimaksud.

Sehubungan dengan perbedaan penentuan target indikator kinerja dimaksud pada tahun 2021 dan 2022, maka untuk capaian pada periode tahun 2022 bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 dan 2021 untuk target tahun 2021 mengalami kenaikan dengan capaian tidak mengalami perubahan dan selalu tercapai melebihi dari target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 90 persen, realisasi telah mencapai 100 persen melebihi dari target yang ditentukan.

Untuk memperoleh hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

RUMUS	
$X = \frac{a}{b} \times 100$	
Keterangan:	
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS
a	Jumlah provinsi yang melaporkan hasil pembinaan
b	Jumlah DKP Provinsi yang wajib melaporkan

PERHITUNGAN	
$X = \frac{a \ 34}{b \ 34} \times 100 = 100 \%$	
Keterangan:	
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS
a	Terdapat 34 provinsi yang melaporkan hasil pembinaan
b	34 DKP Provinsi yang wajib melaporkan

Hingga periode tahun 2022 terdapat **34 Provinsi** yang telah aktif melaporkan kegiatan pembinaan POKMASWAS nya antara lain:

Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Tahun 2022

NO	PROVINSI	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Aceh	√	-
2	Sumatera Utara	√	-
3	Sumatera Barat	√	-
4	Sumatera Selatan	√	-
5	Jambi	√	-
6	Bengkulu	√	-
7	Lampung	√	-
8	Riau	√	-
9	Kepulauan Riau	√	-
10	Kepulauan Bangka Belitung	√	-
11	Banten	√	-
12	DKI Jakarta	√	-
13	Jawa Barat	√	-
14	Jawa Tengah	√	-
15	Jawa Timur	√	-
16	DI Yogyakarta	√	-

NO	PROVINSI	AKTIF	TIDAK AKTIF
17	Bali	√	-
18	Nusa Tenggara Barat	√	-
19	Nusa Tenggara Timur	√	-
20	Kalimantan Utara	√	-
21	Kalimantan Tengah	√	-
22	Kalimantan Selatan	√	-
23	Kalimantan Timur	√	-
24	Kalimantan Barat	√	-
25	Sulawesi Utara	√	-
26	Sulawesi Barat	√	-
27	Sulawesi Tengah	√	-
28	Sulawesi Tenggara	√	-
29	Sulawesi Selatan	√	-
30	Gorontalo	√	-
31	Maluku	√	-
32	Maluku Utara	√	-
33	Papua	√	-
34	Papua Barat	√	-
Total		34	

Tabel 7. Data target dan realisasi keaktifan pokmaswas

NO	SATKER	Target	Realisasi Kelompok
A. DKP Provinsi			
1	Aceh	15	34
2	Sumatera Utara	15	15
3	Sumatera Barat	59	59
4	Sumatera Selatan	38	38
5	Jambi	35	35
6	Bengkulu	24	32
7	Lampung	41	65
8	Riau	39	40
9	Kepulauan Riau	48	48
10	Kepulauan Bangka Belitung	33	35
11	Banten	14	23
12	DKI Jakarta	10	13
13	Jawa Barat	60	71
14	Jawa Tengah	35	37
15	Jawa Timur	49	96
16	DI Yogyakarta	38	39
17	Bali	37	37
18	Nusa Tenggara Barat	48	46

NO	SATKER	Target	Realisasi Kelompok
19	Nusa Tenggara Timur	24	22
20	Kalimantan Utara	16	18
21	Kalimantan Tengah	24	26
22	Kalimantan Selatan	88	94
23	Kalimantan Timur	14	14
24	Kalimantan Barat	34	34
25	Sulawesi Utara	33	30
26	Sulawesi Barat	17	17
27	Sulawesi Tengah	17	17
28	Sulawesi Tenggara	18	30
29	Sulawesi Selatan	44	75
30	Gorontalo	14	24
31	Maluku	12	15
32	Maluku Utara	31	36
33	Papua	6	30
34	Papua Barat	15	20
B. UPT PSDKP			
1	Lampulo	3	4
2	Batam	2	2
3	Jakarta	14	22
4	Bitung	4	6
5	Benoa	6	6
6	Belawan	3	3
7	Pontianak	4	4
8	Cilacap	11	14
9	Tarakan	1	2
10	Kupang	3	3
11	Ambon	3	3
12	Biak	1	1
Total		1100	1335

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp243.464.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp240.941.000,- atau 98,96% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks).

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisi Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	80	100	125	80	96,67	120,84	80	93,33	116,66	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja untuk periode Tahun 2022 sebesar 93,33 dengan persentase capaian sebesar 116,66%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 6,67% dari yang sebelumnya sebesar 96,67% dan 2021 terdapat penurunan sebesar 3,34% dari yang sebelumnya sebesar 96,67%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh pemantauan terhadap kapal pengangkut ikan hidup baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dikarenakan sebelumnya masih dalam proses peralihan perizinan kapal pengangkut ikan hidup yang sebelumnya berada di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjadi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun, mulai pada Tahun 2022, seluruh indikator sudah dapat terpenuhi. Realisasi untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra karena belum masuk di dalamnya sebagai target.

Rincian capaian per indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian capaian per Indikator

No	Indikator	Bulan												Bobot	TW IV
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	40
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	20	13,33
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
Indeks														93,33	

Indikator kinerja diatas memiliki rincian sebagai berikut:

1. Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transmiter, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama Tahun 2022, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 2372 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 10. Indikasi Kapal Perikanan

No	Indikasi Pelanggaran	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	Pelabuhan Pangkal/ Muat	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI
1	Januari	39	21	0	0	0	0
2	Februari	60	20	20	0	0	0
3	Maret	49	12	24	0	0	0
4	April	77	11	35	15	1	1
5	Mei	163	18	15	8	1	0
6	Juni	235	24	4	1	0	1
7	Juli	206	19	8	17	3	1
8	Agustus	211	17	2	6	10	4
9	September	291	4	2	0	9	9
10	Oktober	233	13	3	0	0	0
11	November	232	5	1	0	0	0
12	Desember	175	8	4	24	0	0
	TOTAL	1971	172	118	71	24	16

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2021 maupun 2022.

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode tahun 2022 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 2240 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

No.	Kawasan Konservasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kkp Buruway, Arguni, Teluk Etna, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	6	4	6	8	7	8	9	5	5	5	6	4
2	Kkp Gugusan Pulau-Pulau Momparang Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kkp Gili Sulat, Gili Lawang, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Kkp Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat	14	10	7	9	13	6	6	9	17	14	8	
5	Kkp Sawo-Lahewa Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara	0	1	0	1	11	3	5	6	5	4	7	6
6	Kkp Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai Di Provinsi Sumatera	4	6	2	0	3	5	3	3	1	1	7	1

No.	Kawasan Konservasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barat												
7	Kkp4k Kepulauan Derawan Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	0	1	3	0	1	1	3	1	4	1	1	1
8	Kkp4k Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku	1	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1
9	Kawasan Konservasi Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya	0	5	0	1	0	1	1	2	0	2	0	1
10	Sap Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0
11	Sap Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	0	0	1	0	1	2	0	1	2	0	0	1
12	Sap Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Maluku	47	62	30	2	11	22	65	27	70	51	220	250
13	Tnp Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	76	53	21	0	5	3	4	1	1	0	4	29
14	Twp Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau	0	79	82	92	74	104	62	79	70	80	77	52
15	Taman Wisata Perairan (Twp)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

No.	Kawasan Konservasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laut Banda Di Provinsi Maluku												
16	Taman Wisata Perairan (Twp) Kepulauan Padaido Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total		149	224	154	114	130	156	159	127	168	163	338	358

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 dan 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2020, 2021 maupun 2022.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian sampai dengan bulan Desember 2022 telah melakukan pemantauan terhadap 404 kapal pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Pemenuhan analisis data pada Tahun 2022 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan Data untuk Ops Kapal Pengawas / *Airborne Surveillance*.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp4.936.640.000,- dan sampai dengan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp4.905.642.881,- atau 99,37% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks), (3) Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (indeks).

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
9. dan Kawasan Konservasi;
10. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
11. Internasional;
12. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-3 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022			RENSTRA		
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	-	-	-	-	92	95,46	103,76	-	-	-

Indikator baru ini merupakan hasil penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu “Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Pesawat Patroli”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 dan 2021. Hingga Tahun 2022 target kinerja IKU Indeks Kinerja Pesawat Patroli telah tercapai sebesar 95,46 persen dengan persentase capaian sebesar 103,76 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 karena merupakan IKU baru di tahun 2022.

Selama periode operasi Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 150 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain:

1. Periode I: KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Paus 01.
2. Periode I-A: Operasi Mandiri.
3. Periode I-B: Operasi Mandiri.
4. Periode I-C: Operasi Mandiri.
5. Periode II: Operasi Mandiri.
6. Periode II-A: Operasi Mandiri.
7. Periode III Lanjutan: KP.Orca 01 dan KP. Orca 04.
8. Periode III-A: Operasi Mandiri.
9. Periode IIIB: Operasi Mandiri.
10. Periode III-C: Operasi Mandiri.
11. Periode III-D: Operasi Mandiri.
12. Periode III-D (RTE): Operasi Mandiri.
13. Periode III-E: Operasi Mandiri.
14. Periode IV: KP. Orca 03, KP. Orca 01, KP. Orca 02, KP. Orca 04, KP. Paus 01, KP. HMT 01.
15. Periode IV-A: Operasi Mandiri.
16. Periode V: KP. Hiu 15.
17. Periode VI: KP. Hiu 15.
18. Periode VI-A: Operasi Mandiri.
19. Periode VII: Operasi Mandiri.
20. Periode VII-A: Operasi Mandiri.
21. Periode VIII: Operasi Mandiri.
22. Periode IX: KP. Hiu 15.
23. Periode IX-A: Operasi Mandiri.
24. Periode IX-B: KP. Orca 02, KN. Pulau Dana 323, ABF Cape Size Vessel.
25. Periode X: KP. Hiu Macan 05 dan KP. Hiu 17.
26. Periode XI: Operasi Mandiri.
27. Periode XI-A: Operasi Mandiri.
28. Periode XII-A: Operasi Mandiri

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 13. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode XII-A 2022

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
---------	---------------------	----------	----------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------------

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	6 – 25 Januari 2022	15	711, 571, 712, 713, 715, 573	144.428,8	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Paus 01	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 11 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Rawai >30 GT KM. Soyo Lestari Rawai Dasar dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 12 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Tetap Jaya 01 dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 18 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Rejeki – V dan KM. Eka Cakra – 2, 4 Kapal Bouke Ami > 30 GT KM. Yama Toba – 05, KM. Harapan Baru, KM. Dian Jaya – I, KM. Mandiri – 08 dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 22 Januari 2022 terhadap 12 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Timur, KM. Satria Perkasa, KM. Setia Rejeki, KM. Setia Jaya

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>Makmur, KM. Setia Bhakti F, KM. Setia Mulya Jaya, KM. Setia Mulya Makmur, KM. Baruna Nusantara – 2, KM. Harapan Jaya Makmur, KM. Indah Jaya – I, KM. Indah Kail, KM. Tri Mina Prima dengan status transmitter aktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 23 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Cumi >30 GT KM. Merauke Jaya, 1 Kapal Purse Seine > 30 GT KM. Khas dengan status transmitter aktif. • Validasi ketaatan tanggal 25 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Sari Jati Mulya dan KM. Tan Jaya -7, 1 Kapal Penampung KM. Bandar Angkut Jaya-1 dengan status transmitter aktif.
I-A	7 & 16 Januari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I-B	27 – 30 Januari 2022	4	711	3054,9	OPERASI MANDIRI	Tindak lanjut hasil pemantauan melalui matra udara adalah validasi kepatuhan 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Harapan Sentosa III, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Surya – 6, 1 (satu) unit Kapal Rawai Dasar dengan nama lambung KM. Sumber Rejeki Berkembang – 2, dan 1 (satu) unit Kapal Bouke Ami dengan nama lambung KM. Mekar Alam Jaya – 8 dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-C	26 - 30 Januari 2022	2	711, 712	-	OPERASI MANDIRI	-
II	31 Januari & 5 Februari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
II-A	9 – 24 Februari 2022	12	711, 572, 716, 713, 573	63.747,2	OPERASI MANDIRI	Validasi ketaatan tanggal 12 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Filadelfia - 02 dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>13 Februari 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Perintis Samudra, KM. Tiga Saudara, KM. Sumber Jaya, KM. Chelsea Ratna Wijaya, dengan status transmitter aktif.;</p> <p>Validasi ketaatan tanggal 21 Februari 2022 terhadap 3 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Halindo Utama, KM. Kasih Setia – XVI.A, Kasih Setia – IX dengan status transmitter aktif.;</p> <p>Validasi ketaatan tanggal 22 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Surya Terbit 7 dengan status transmitter aktif.;</p>
III	25 Februari - 19 Maret 2022	15	571, 572, 573, 711, 712, 715, 716	154.298	KP ORCA 01, KP ORCA 04	<p>1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP):</p> <ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Jasa Mina Srikawit dengan status transmitter aktif.; Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>2 Kapal Pengangkut >30 GT KM. Sakti Bahagia dan KM. Karya Manggala Sakti dengan status transmitter aktif.;</p> <ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Marcel Jaya - 28 dengan status transmitter aktif Validasi ketaatan tanggal 16 Maret 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Garuda Jaya - I, KM. Cendrawasih Jaya 198, KM. Rajawali Jaya Baru dan KM. Bintang Surya 7 dengan status transmitter aktif; <p>2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat;</p> <p>3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;</p>
IIIA	28 Februari - 1 Maret 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret	6	715, 573	13.104	OPERASI MANDIRI	-

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
	2022					
IIIC	7 - 13 Maret 2022	6	715, 712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIID	11 - 20 Maret 2022	3	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIID (RTB)	20 Maret 2022	0	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIE	15 Maret 2022	1	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	11	713, 718, 712, 711	133.149	<p>KP. ORCA 03, KP. ORCA 01, KP. ORCA 02, KP. ORCA 04, KP. PAUS 01, KP. HIU MACAN TUTUL 01</p>	<p>1. Validasi kepatuhan 2 unit Kapal Cumi (Bouke Ami) dan 1 unit Kapal Cast Net (Jala Jatuh Berkapal) dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.</p> <p>2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas;</p> <p>3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal, Thailand, Vietnam, China dan Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;</p> <p>4. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya;</p> <p>5. Pendaataan data</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 712, 713, dan 718. 6. Telah Dilaksanakan Dukungan Misi SAR di Sekitar Pulau Tior
IVA	23 - 24 Maret 2022	2	713	-	-	-
V	19 - 31 Mei 2022	12	711, 716, 715, 717, 718, 714, 713, 573	173.405	KP. HIU 15	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat, Waigeo, Perairan laut Aru bagian Tenggara, Perairan laut sawu, dan Perairan Kepulauan Kapoposang; 3. Penerusan informasi keberadaan KIA Filipina dengan alat tangkap Purse Seine dan Pumpboat ke Kapal Pengawas HIU 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna;
VI	7 - 13 Juni 2022	5	712, 713, 714, 716	55.270,4	KP. HIU 15	1. Terpantau 8 KIA Light Boat, 7 KIA Purse Seine, 3 KIA Penampung, dan 23 FAD (Ponton) asal Filipina di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 2. Hasil Pemantauan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						tersebut telah di teruskan kepada Kapal Pengawas Hiu 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna. 3. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
VI-A	27 Juni - 2 Juli 2022	5	711	92.644,4	OPERASI MANDIRI	KIA yang terpantau di perbatasan RI – Vietnam masih berada di luar batas ZEEI, selanjutnya dilakukan proses pemantauan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Pangkalan PSDKP Batam.
VII	13 - 24 Juli 2022	9	571, 714, 715, 718, 713, 573	108.681,6	OPERASI MANDIRI	1. Validasi kepatuhan 8 unit Kapal Perikanan dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif, 1 unit Kapal Perikanan dengan status transmitter aktif (SIPI Expired), dan 1 unit Kapal Perikanan dengan status transmitter tidak aktif; 2. Pemantauan Kawasan TWP Laut Sawu, TWP Laut Banda, Gili Ayer & Gili Trawangan.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
VII-A	25 - 29 Juli 2022	2	711	28.390,4	OPERASI MANDIRI	1. Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar; 2. Pendaataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711.
VIII	12 Agustus 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar;
IX	11 - 16 September 2022	6	716, 715, 718	29.712	KP. HIU 15	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP): <ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan 1 Kapal Rawai Dasar (KM. Nok Lutfi) dan 2 Kapal Gill Net (KM. Kartika Sari 2 dan KM. Putra Aukil 2) tanggal 11 September 2022 dengan status aktif Validasi kepatuhan 1 Kapal Purse Seine (KM. Sinar Laut) tanggal 16 September 2022 dengan status aktif 2. Pemantauan aktifitas Kapal Ikan Asing di WPPNRI 716 dan tidak ditemukan adanya aktifitas KIA maupun ABPI asing;

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
IX-A	13 - 19 September 2022	4	718, 714	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar;
IX-B	22 - 30 September 2022	8	711, 713, 573	70.953,6	KP. ORCA 02, KN. PULAU DANA 323, ABF Cape Size Vessel	1. Penerusan informasi keberadaan Kapal Perang China, Jepang, dan Kapal Induk; 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas dan Laut Sawu; 3. Telah Dilaksanakan Dukungan Patroli Bersama Gannet AUSINDO - 6 2022.
X	17 - 20 dan 23 Oktober 2022	5	711, 713	36.857,6	KP. HIU MACAN 05, KP. HIU 17	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP): • Tanggal 17 Oktober 2022: 1 Kapal Purse Seine (KM. Haiteri) dengan status aktif. • Tanggal 18 Oktober 2022: 2 Kapal Purse Seine (KM.Putra Wijaya & KM. Berkah Putra Jaya - 2), dimana Transmitter kapal KM.Putra Wijaya berstatus aktif, sedangkan Transmitter kapal KM. Berkah Putra Jaya - 2 Tidak Aktif;

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						2. Telah Dilaksanakan Dukungan Kegiatan Pimpinan dengan lancar
XI	26 - 28 Oktober 2022	5	712, 572, 713	11161.6	OPERASI MANDIRI	1. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. 2. Telah Dilaksanakan Dukungan Kegiatan Pimpinan dengan lancar
XI-A	26 - 28 Oktober & 3 November 2022	3	712	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar
XII-A	12 - 14 Desember 2022	2	711	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar
Total Hari Operasi		150	Total Coverage Area (NM²)	1.118.858,5		

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
- 2) Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang berisikan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
- 3) Mengurangi volume *ferry flight* secara signifikan.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp50.889.642.000,- dan sampai dengan akhir Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp50.817.717.211,- atau 99,86% dari total pagu.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	86,72	88,24	101,75	86,75	90,68	104,53	85	91,57	107,73	89	91,57	102,89

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 91,57 dengan persentase capaian sebesar 102,89%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar 3,33% dari yang sebelumnya sebesar 88,24% dan 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,89% dari yang sebelumnya sebesar 90,68%. Kenaikan capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 89 persen, realisasi telah mencapai 91,57 persen melebihi dari target yang ditentukan.

Selama periode Tahun 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 30 Kapal Pengawas selama tahun 2022 sebanyak 1891 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 63 hari operasi.

Adapun hasil operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Pengawas ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Tahun 2022

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	Operasi Periode I (1 s.d 31 Januari 2022)	338	1642,9	270	4	274	18	4	22
2	Operasi Periode II (1 s.d 28 Februari 2022)	230	2544	288	2	290	5	0	5
3	Operasi Periode III (1 s.d 31 Maret 2022)	289	3693,2	564	2	566	27	2	29
4	Operasi Periode IV (1 s.d 30 April 2022)	301	4835	964	0	964	14	0	14
5	Operasi Periode V (1 s.d 31 Mei 2022)	239	2526,84	291	3	294	1	0	1
6	Operasi Periode VI (1 s.d 30 Juni 2022)	71	1048,44	76	2	78	0	2	2
7	Operasi Periode VII (1 s.d 31 Juli 2022)	81	825,16	105	4	109	2	2	4
8	Operasi Periode VIII (1 s.d 31 Agustus 2022)	108	723,38	48	3	51	2	1	3
9	Operasi Periode IX (1 s.d 30 September 2022)	63	536,05	80	3	83	0	3	3
10	Operasi Periode X (1 s.d 31 Oktober 2022)	82	1048,96	146	0	146	3	0	3

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
11	Operasi Periode XI (1 s.d 30 November 2022)	110	1297,6	352	3	355	1	3	4
12	Operasi Periode XII (1 s.d 31 Desember 2022)	30	347,72	31	1	34	0	0	0
Jumlah		1891	20885,63	3282	27	3309	73	17	90

Target hari operasi kapal pengawas perikanan yang dioperasikan Direktorat POA untuk tahun 2022 sebesar 80 hari. Target hari operasi tersebut bersifat rata-rata. Berikut disampaikan data series target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu 5 tahun (2018-2022).

Tabel 16. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2018-2022

Tahun	Target Hari Operasi	Capaian Hari Operasi	Persentase Capaian (%)
2018	145	122	84.14
2019	84	88	103.53
2020	105	109	103,81
2021	103	106	102,91
2022	80	81	101,25

Berdasarkan tabel 16 di atas, terlihat bahwa target hari operasi tertinggi pada tahun 2018, dengan persentase capaian tertinggi pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi armada kapal pengawas perikanan yang siap operasi cukup banyak. Dari target dan capaian hari operasi kapal pengawas perikanan tersebut, berikut disampaikan capaian hasil operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu (2018-2022) sebagai berikut:

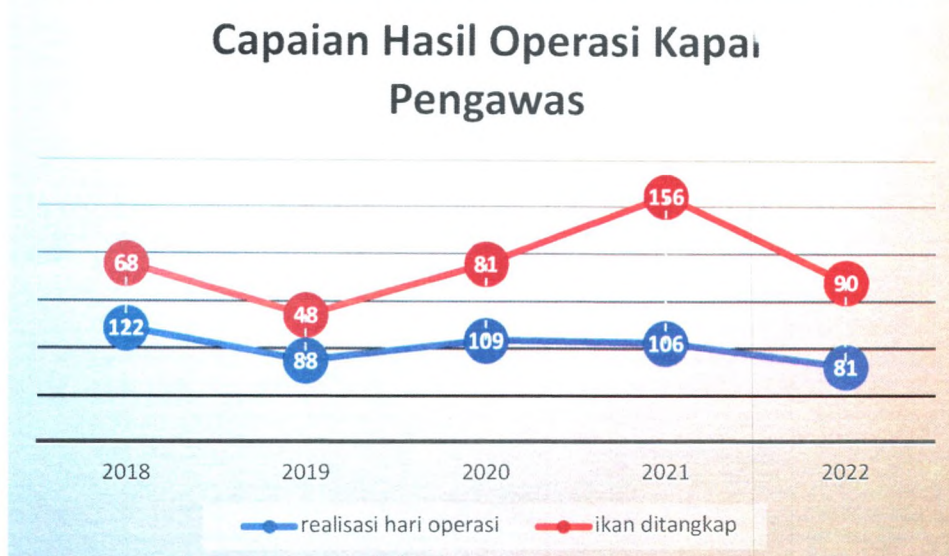
Tabel 17. Capaian Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan

Tahun	Realisasi Hari Operasi	Kapal Ikan Diperiksa	Kapal Ikan Ditangkap	Kapal Ikan Patuh	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	122	3.651	68	3583	98.14
2019	88	2.585	48	2537	98.40
2020	109	2.969	81	2888	97.27
2021	106	2.827	156	2671	94.48
2022	81	3.309	90	3219	97,28

Berdasarkan tabel 17 di atas, terlihat bahwa hari operasi tertinggi sebanyak 122 hari operasi pada tahun 2018 dengan capaian kapal ikan diperiksa sebanyak 3.651 unit, bila dibandingkan dengan

hari operasi pada tahun 2022 sebanyak 81 hari operasi dengan capaian kapal ikan yang diperiksa sebanyak 3.309 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia baik yang dilakukan Kapal Ikan Asing maupun Kapal Ikan Indonesia masih terus terjadi dan cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2. Grafik capaian hasil operasi kapal pengawas kurun waktu (2018-2022)



Berdasarkan gambar 2 diatas, terlihat trend capaian hasil operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan secara eksponensial, utamanya sejak tahun 2020 dimana kapal ikan yang ditangkap sejumlah 81 unit, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 156 unit dan pada tahun 2022 menurun menjadi 90 unit kapal ikan yang ditangkap dikarenakan jumlah hari operasi yang mengalami penurunan dengan adanya kebijakan Automatic Adjustment pada T.A 2022.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya Automatic Adjustment (AA), maka salah satu strategi yang diambil untuk pemenuhan variable IKU adalah dengan mengoptimalkan pergerakan pada sektor-sektor tertentu yang dapat meningkatkan jumlah riksa secara signifikan;
2. Penggunaan RPM secara proporsional untuk mengendalikan penggunaan BBM sehingga meningkatkan cakupan wilayah pengawasan dan endurance meningkat;
3. Meminimalisasi pencapaian “upaya pemenuhan variabel target operasi” (khususnya bagi kapal Kelas 1) untuk meningkatkan efisiensi operasi dan cakupan wilayah pengawasan.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp108.728.286.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp108.692.656.911,- atau 99,97% dari total pagu.

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM), dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari:

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%).

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	-	90	90	100	-	-	-

Indikator “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan IV 2020 dan periode Triwulan IV 2021. Pencapaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP pada Tahun 2022 sebesar 90 dengan persentase capaian sebesar 100 persen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 karena merupakan IKU baru di tahun 2022.

Selama periode tahun 2022 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Logistik KP Berupa BBM KP, Pelumas, Air Bersih, Ongkos Angkut, BBM Sea Rider / Rubber Boat;
2. Dukungan Logistik Berupa ATK, Bahan Komputer, Penjilidan Laporan, Jurnal Deck & Mesin, Buku PASUT, Biaya Pengiriman Laporan, Biaya Sewa DARDER KP. Akar Bahar, Komaliwan, dan Perdin Kegiatan Logistik;
3. Pemenuhan Logistik Awak Berupa Honor TKP, Jamuan Tamu, BPDT, Delegasi, Jaga Sandar, Perdin Konsultasi AKP Pusat, Natura (Bahan Makanan);

4. Pemenuhan Bahan Pemeliharaan Senpi, Perpanjangan Buku PAS Senpi, Pembaharuan Buku Pas SS1, Pembuatan Kartu Pengpin, Pembelian Munisi, Perdin Operasional Senpi dan Biaya Instruktur Bongkar Pasang senpi;
5. Perjalanan Dinas untuk Pembinaan dan Rotasi bagi Awak Kapal Pengawas;
6. Pengadaan Perlengkapan COVID 19, Biaya Tes Swab AKP, dan Fasilitas Isoman Untuk AKP.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP.

6

PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2022 terdapat Pengadaan Speedboat Pengawas sebanyak 2 (dua) unit dan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan *Multi Years Contract (MYC) Tahun anggaran 2022-2023*. Pengadaan Speeboat sudah selesai 100% pada bulan maret 2022 dan sudah dioperasikan untuk Patroli Pengawasan. Untuk Progres Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) hingga akhir Desember 2022 Kapal 1 (SA-041) sebesar 10,7392% dan Kapal 2 (SA-042) sebesar 10,4364%. Foto dokumentasi kegiatan kontruksi kapal sampai dengan akhir Desember 2022 dapat dilihat gambar dibawah ini:



Kapal Pengawas Kode Produksi SA -041



Gambar 3. Dokumentasi Pengadaan Kapal Pengawas Multi Years Contract (MYC) T.A 2022-2023.

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	55	55,29	100,53	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan IV 2021. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2022 sebesar 55,29% dari target sebesar 55% dengan persentase capaian sebesar 100,53 persen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 karena merupakan IKU baru di tahun 2022.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target tersebut diatas, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan;

2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan (galangan) dengan didampingi tim desain BRIN, tim Itjen KKP, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;
3. PPK memberikan surat instruksi yang diperlukan kepada penyedia dan konsultan pengawas;
4. Melakukan open management dengan melibatkan Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, BPKP, Itjen KKP, LKPP dan pihak terkait lainnya.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar Rp53.643.894.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp53.537.654.732,- atau 99,80% dari total pagu.

7

PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2022.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Tahun 2022 terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perawatan Pencegahan (*Preventive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (*preventive maintenance*) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (*Predictive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (*Breakdown maintenance*) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*), kegiatan perbaikan ini sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TW IV 2020			TW IV 2021			TW IV 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TW IV 2020			TW IV 2021			TW IV 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP												

Indikator baru ini merupakan hasil penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 dan 2021. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada. Adapun target kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 yaitu 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100 dengan realisasi persentase sebesar 100%, hal ini dipengaruhi oleh monitoring kepada tiap UPT dengan mengharuskan melaporkan kondisi armada setiap bulannya agar kegiatan perawatan rutin dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan agar seluruh Armada siap beroperasi untuk mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia.

Selama periode tahun 2022 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP, telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan 8 unit kapal pengawas di satker Pusat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 21. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan			Keterangan
		Perawatan pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat	
1	KP. ORCA 01	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
2	KP. ORCA 02	Perawatan rutin bulanan	-	Penggantian Body Axial Marine Fan Ruang Bow Truster , Pemasangan Housing Blower Buritan, Pembersihan Tritip Lambung Bawah Air , Penggantian Electro Motor Blower Haluan, penggantian mounting karet <i>auxilliary engine</i> ,	Selesai
3	KP. ORCA 03	Perawatan rutin bulanan	<i>Top Overhaul main engine</i>	-	Selesai
4	KP. ORCA 04	Perawatan rutin bulanan	<i>Top Overhaul main engine</i>	Penggantian Display Wind Speed Direction	Selesai

		Docking	-	-	Selesai
5	KP. HMT 01	Perawatan rutin bulanan	<i>Repowering auxiliary engine harbour</i>	penggantian komponen sistem DC elektrik <i>auxiliary engine</i> kiri, penggantian <i>screen filter</i> dan <i>solenoid fuel pump</i>	Selesai
6	KP. HMT 02	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
7	KP. PAUS 01	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
		Perbaikan ruang akomodasi	-	-	Selesai
8	KP. AKAR BAHAR	Perawatan rutin bulanan	-	Scaling Condenser dan Service AC	Selesai
		Docking	-	-	Selesai

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun repair list masing-masing Kapal Pengawas secara rinci;
- 2) Senantiasa melakukan rapat konsultasi dengan APIP terkait pekerjaan tersebut;
- 3) Menyusun dokumen manajemen resiko kegiatan perawatan;
- 4) Senantiasa melakukan rapat evaluasi kepada pihak galangan atau pelaksana pekerjaan untuk mengetahui progress pekerjaan;
- 5) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala dan bergantian untuk mempermudah koordinasi dan memperoleh data faktual detail pekerjaan dilapangan.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp 45.607.692.000,- dan sampai dengan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 45.604.735.935,- atau 99,99% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 5

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (4) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (7) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik, (8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA, (10) Persentase unit kerja yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (11)) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

8

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT),
Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;
2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan,
Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.
3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan,
Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	-	-	-	80	89,96	112,45	80	91,97	114,96	80	91,97	114,96

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 91,97 dengan persentase capaian sebesar 114,96%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, tidak bisa dibandingkan dikarenakan berbeda dengan IKU sebelumnya dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 2,01% dari yang sebelumnya sebesar 89,96%. Peningkatan terjadi pada produk layanan Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan, kenaikan capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 114,96 persen, dengan

demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Rincian Perbandingan Hasil IKM Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan Hasil IKM

PRODUK LAYANAN	TRIWULAN IV 2020	TRIWULAN IV 2021	TRIWULAN IV 2022
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	-	92,71	93,10
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	-	89,94	89,05
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	-	92,55	93,21
Total	-	275,20	275,36
Rata-rata	-	91,73	91,97

Selama periode tahun 2022 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi Klarifikasi Pelanggaran SPKP (Tegal, 24-26 Oktober 2022);
2. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2022 (Pekalongan, 27 Oktober 2022);
3. Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tahun 2022 (Probolinggo, 10 November 2022);
4. Pemeriksaan Transmitter Kapal Perikanan (Cirebon, 1 Desember 2022);
5. Sosialisasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Probolinggo, 19 Desember 2022);
6. Sosialisasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Benoa, 22 Desember 2022);
7. Sosialisasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Jakarta, 26 Desember 2022);
8. Sosialisasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Karangsong, 27 Desember 2022).

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp2.115.166.000,- dan sampai dengan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.989.549.829,- atau 94,06% dari total pagu.

9

PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN NSPK BIDANG PENGAWASAN SDKP LINGKUP DIREKTORAT POA

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2022 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	100	100	100%	100	120	120	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 120%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi draft NSPK berupa “Petunjuk Teknis (Juknis) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan” yang diselesaikan, ditargetkan sebanyak satu Juknis dengan capaian sebanyak dua Juknis.

Indikator ini baru digunakan mulai tahun 2021, sehingga untuk realisasi tahun 2020 tidak dapat dilakukan komparasi capaian. Selanjutnya, bila dibandingkan pada periode yang sama realisasi tahun 2022 dan tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 20%. Peningkatan terjadi dikarenakan penyelesaian rancangan NSPK melebihi dari target yang ditentukan. Indikator belum masuk ke dalam dokumen Renstra Ditjen PSDKP, sehingga tidak dapat dibandingkan pada masa akhir Renstra 2024.

Keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut, tak terlepas dari beberapa upaya sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendorong penyelesaian NSPK di bidang Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Senantiasa dilakukan monitoring progress oleh Direktur POA dalam berbagai kesempatan, seperti Apel Pagi setiap hari Senin dan dalam forum-forum rapat internal Direktorat POA.

Tabel 25. Draft NSPK yang disusun oleh Direktorat POA

No	Kelompok	Nama Juknis	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Infrastruktur Pengawasan SDKP	Juknis Pendaftaran Kapal Pengawas	1 NSPK	1 NSPK	100
2.	Operasi Pusat Pengendalian	Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan SDKP	1 NSPK	1 NSPK	100
3.	Pengawasan dan Logistik	Pola Karir Awak Kapal Pengawas DJPSDKP	1 NSPK	1 NSPK	100
4.	Operasi	Juknis Pemeliharaan	1 NSPK	2 NSPK	200

No	Kelompok	Nama Juknis	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Armada	dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan			
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan Lingkup Direktorat POA (rata-rata)					120

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Direktorat lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	100%	100%
2	Direktorat POA	120%	120%
3	Direktorat PPSDP	100%	100%
4	Direktorat PPSDK	100%	100%
5	Direktorat PP	100%	100%

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp1.014.000,- dan sampai dengan akhir Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.264.000,- atau 26,04% dari total pagu. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan IKU 9 ini terkena Automatic Adjustmen sehingga tidak ada penambahan pada realisasi anggaran tersebut.

10

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: ¹⁾

Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin, dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural:
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20 oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional:
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20 oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf:
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20 oj+ Seminar)/3) + (NilaiSkp) + (Nilai Disiplin)

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	Indeks	T	R	Indeks	T	R	Indeks	T	R	Indeks
Indeks	71	68,85	95,63	73	74,3	101,78	77	81,64	106,03	76	81,64	107,42

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	Indeks	T	R	Indeks	T	R	Indeks	T	R	Indeks
Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA												

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan target Triwulan 2020 dan 2021 realisasi capaian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, dengan pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 sebesar 81,64 dengan realisasi 106,03%, hal ini dipengaruhi oleh faktor dari 4 variabel pengukuran dengan nilai tertinggi ada di variabel disiplin dengan bobot 5% dengan score 99% dan saling mengingatkan antar kelompok untuk menjaga kedisiplinan dilingkungan unit kerja. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 76 persen realisasi ini telah mencapai 81,64 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi hasil Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA untuk menjadikan ASN yang Profesional dan Disiplin serta bertanggung jawab.

Adapun perbandingan nilai capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN antar Direktorat lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	77,58	77,58
2	Direktorat POA	81,64	81,64
3	Direktorat PPSDP	82,22	82,22
4	Direktorat PPSDK	84,02	84,02
5	Direktorat PP	79,06	79,06

11

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). Direktorat POA telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP Tahun 2022 pada Bulan Juni 2022 di Manado dengan peserta sebanyak 35 orang pengguna Layanan SPKP.

Rincian capaian IKU 11 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	75	85	113,33	76	88	115,79	77	93,14	120,96	80	93,14	116,42

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan target Triwulan IV 2021 realisasi capaian meningkat dari target yang ditetapkan, dengan realisasi pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 sebesar 93,14 dengan realisasi 120,96%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar 8,14% dari yang sebelumnya sebesar 85% dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 5,14% dari yang sebelumnya sebesar 88%. Peningkatan terjadi karena nilai *post test* menunjukkan hasil yang baik.

Bimtek dan sosialisasi merupakan salah satu cara agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait aplikasi SPKP dan cara menggunakannya, sehingga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemanfaatan SDKP secara lestari dan bertanggungjawab. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen, sesungguhnya telah terealisasi sebesar 93,14 persen atau dengan kata lain telah tercapai melampaui target, hanya saja perlu upaya dalam mempertahankan capaian tersebut hingga akhir periode Renstra.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pelaksanaan Bimtek SPKP di bidang Operasi Pusat Pengendalian;
2. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengoperasikan Aplikasi SPKP.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	-	-
2	Direktorat POA	93,14%	93,14%
3	Direktorat PPSDP	87,28%	87,28%
4	Direktorat PPSDK	86,11%	86,11%
5	Direktorat PP	80,01%	80,01%

12**NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP DIREKTORAT POA**

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Rincian capaian IKU 12 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	89,91	99,90	90	98,77	109,74	90	97,76	108,62	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2020. Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 capaian realisasi meningkat dengan target yang sama, dan bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 capaian realisasi menurun dengan target yang sama, hal ini dikarenakan jumlah IKU mengalami perubahan. Namun demikian pada tahun 2022 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 sebesar 97,76% dengan realisasi 108,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya upaya perbaikan yang dilakukan Direktorat POA dari aspek penilaian kesesuaian untuk mengecek kembali sesuai dengan kebutuhan rekonsiliasi kinerja. Indikator belum masuk ke dalam dokumen Renstra Ditjen PSDKP, sehingga tidak dapat dibandingkan pada masa akhir Renstra 2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;

2. Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	96,24%	96,24%
2	Direktorat POA	97,76%	97,76%
3	Direktorat PPSDP	94,21%	94,21%
4	Direktorat PPSDK	94,20%	94,20%
5	Direktorat PP	97,55%	97,55%

13

NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2022, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Rincian capaian IKU 13 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	21	27,18	129,43	-	-	-

Indikator “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan IV 2020 dan Triwulan IV 2021. Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 sebesar 27,18 dengan realisasi 129,43%. Dari capaian tersebut Hal ini mengindikasikan bahwa adanya upaya perbaikan yang dilakukan Direktorat POA dari aspek penilaian kesesuaian untuk mengecek kembali sesuai dengan kebutuhan rekon, sehingga capaian tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

1. Hasilkan Inovasi Satker (HIU);
Target Inovasi per Satker telah tercantum pada indikator kinerja utama, Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat;
2. Rapat biasanya dimulai dengan peserta yang sedikit dan banyak terlambat, dengan adanya program ini maka rapat pada Dit. POA dimulai dengan sebagian peserta sudah hadir, sehingga arahan dan substansi awal dapat dipahami.
3. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R);
Ruangan kerja sebelumnya terkesan berantakan dan tidak teratur, maka dengan adanya program masing-masing meja tiap pegawai telah menjalankan program 5R.
4. Upayakan Data Terkini (UPDATE);
Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA);
Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif.
6. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);
Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik.
7. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BAI.RAKUDA);
Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);
Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
9. Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP);
Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
10. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS);
Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi

kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.

11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan capaian IKU lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	25%	25%
2	Direktorat POA	27,18%	27,18%
3	Direktorat PPSDP	27,67%	27,67%
4	Direktorat PPSDK	23,18%	23,18%
5	Direktorat PP	24,86%	24,86%

14

UNIT YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Rincian capaian IKU 14 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 35. Target dan realisasi IKU-14 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	1	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru ada di tahun 2020. Capaian IKU “Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Direktorat

POA” ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Bila dibandingkan dengan tahun yang sama tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi relatif sama dengan capaian melampaui target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2022 sebesar 1 dengan peresentase realisasi 100%, hal ini dipengaruhi agar Direktorat POA selalu membuat inovasi tahunan untuk membuat kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Indikator belum masuk ke dalam dokumen Renstra Ditjen PSDKP, sehingga tidak dapat dibandingkan pada masa akhir Rensura 2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya;
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan capaian IKU Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	1	1
2	Direktorat POA	1	1
3	Direktorat PPSDP	1	1
4	Direktorat PPSDK	1	1
5	Direktorat PP	1	1

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Direktorat POA untuk meningkatkan kualitas secara transparansi dalam pelayanan publik.

15

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Rincian capaian IKU 15 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 37. Target dan realisasi IKU-15 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	72,5	100	137,93	75	100	133,33	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2021. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 tidak bisa dibandingkan karena IKU belum ada, dan bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 capaian realisasi relatif sama, hal ini dikarenakan target mengalami perubahan sebelumnya 72,5 menjadi 75 persen. Namun demikian pada tahun 2022 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga capaian periode Triwulan IV 2022 sebesar 75 dengan persentase realisasi 100%, untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh siapnya data dukung dan juga pencatatan BAST pemeliharaan BMN yang ada dan kesesuaian antara RKBMN dengan RKAKL. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	100%	100%
2	Direktorat POA	97,19%	97,19%
3	Direktorat PPSDP	100%	100%
4	Direktorat PPSDK	100%	100%
5	Direktorat PP	100%	100%

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Rincian capaian IKU 16 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 39. Target dan realisasi IKU-16 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020		2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	72,5	93,39	128,81	75	97,19	129,59	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2021. Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA" bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 tidak bisa dibandingkan karena IKU belum ada, dan bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 capaian realisasi meningkat sebesar 3,8% dari capaian sebelumnya 93,39 persen, hal ini dikarenakan target mengalami perubahan sebelumnya 72,5 menjadi 75 persen. Namun demikian pada tahun 2022 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga capaian periode Triwulan IV 2022 sebesar 75 dengan peresentase realisasi 100%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi dari 4 indikator penilaian ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang /jasa tercatat dengan jelas dan lengkap sesuai dengan kegiatan yang ada.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	TW IV 2022	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	100%	100%
2	Direktorat POA	97,19%	97,19%
3	Direktorat PPSDP	100%	100%
4	Direktorat PPSDK	100%	100%
5	Direktorat PP	100%	100%

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA.

17

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

- a. Keikutsertaan
Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV
- b. Dokumen
Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain: Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja
- c. Keaktifan
Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who* (tentang siapa), *What* (Apa yang terjadi), *Where* (dimana peristiwa terjadi), *When* (kapan peristiwa terjadi), *Why* (mengapa hal itu terjadi), dan *How* (bagaimana hal itu terjadi).

Rincian capaian IKU 17 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 41. Target dan realisasi IKU-17 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar	82	90,37	110,21	84	98,79	117,61	86	100	116,28	90	100	111,11

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Lingkup Direktorat POA												

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 capaian realisasi meningkat sebesar 9,63% dari capaian sebelumnya 90,37% dan bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 capaian realisasi meningkat sebesar 1,21% dari capaian sebelumnya 98,79 persen, hal ini dikarenakan target mengalami perubahan selalu meningkat dan target capaian pemenuhan upload bitrix yang semula 3 kali menjadi 6 kali upload. Namun demikian pada tahun 2022 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga periode Triwulan IV 2022 sebesar 100 dengan realisasi 116,28%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan setiap waktu. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 42. Tabel Capaian Nilai IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022

No	Unit Kerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	97,08%	98,54%	74,48%	83,96%	88,33%
2	Direktorat POA	100%	99%	98,15%	100%	99,37%
3	Direktorat PPSDP	96,76%	99,84%	97,81%	96,76%	97,79%
4	Direktorat PPSDK	98,06%	99,68%	97,41%	99,27%	98,61%
5	Direktorat PP	96,44%	98,06%	98,38%	94,49%	96,84%

18

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Rincian capaian IKU 18 Direktorat POA periode Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 43. Target dan realisasi IKU-18 periode Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	60	75,92	126,53	65	80	123,08	70	70	100	80	70	87.50

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020 realisasi capaian mengalami penurunan sebesar 26,53% dari target yang ditetapkan dan bila dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2021 realisasi capaian mengalami penurunan sebesar 23,08%, dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan dari target yang bertambah tiap tahunnya dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Namun demikian pada tahun 2022 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga periode Triwulan IV 2022 sebesar 70 dengan realisasi 100%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi belum tercapai dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses tindak lanjut berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 44. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	35	33	94,29	2	5,71
2	Direktorat POA	0	0	-	0	0
3	Direktorat PPSDK	5	5	100	0	0
4	Direktorat PPSDP	0	0	-	0	0
6	Direktorat PP	0	0	-	0	0

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Tahun 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp316.080.010.000 (tiga ratus enam belas miliar delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp332.477.900.000 (tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dikarenakan adanya penyesuaian anggaran Automatic Adjustment pada Anggaran tahun 2022, Pagu Satker Direktorat POA menjadi Rp275.634.581.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 275,251,639,208** atau **99,86%** dari pagu **Rp275.634.581.000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 lebih tinggi, realisasi Triwulan IV 2021 sebesar **Rp. 200,660,185,239** hal ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat POA seperti melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta proses pembayaran pembangunan fisik Kapal Pengawas Kelas II.

Tabel 45. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2022

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	1.014.000	264.000	26,04%	750.000	73,96%
Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	2.115.166.000	1.989.549.829	94,06%	125.616.171	5,94%
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang dipantau	549.625.000	543.319.145	98,85%	6.305.855	1,15%
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang di pantau	243.464.000	240.941.000	98,96%	2.523.000	1,04%
Operasi Kapal Pengawas	108.728.286.000	108.692.656.911	99,97%	35.629.089	0,03%
Operasi Pesawat Patroli	50.889.642.000	50.817.717.211	99,86%	71.924.789	0,14%
Kapal Pengawas	53.643.894.000	53.537.654.732	99,80%	106.239.268	0,20%

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Speedboat Pengawas	8.919.158.000	8.919.157.564	100%	436	0%
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	45.607.692.000	45.604.735.935	99,99%	2.956.965	0,01%
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	4.936.640.000	4.905.642.881	99,37%	30.997.119	0,63%
TOTAL	275.634.581.000	275.251.639.208	99,86%	382.941.792	0,14%

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi. namun pencapaian kinerja sangat tergantung pada kondisi dilapangan mengingat terjadi pandemi covid-19 dan terdapat kebijakan pemerintah secara Nasional dimana dilakukan penyesuaian anggaran Automatic Adjustment, dimana Pagu semula Rp332.477.900.000 menjadi Rp275.634.581.000.

Optimalisasi yang telah dilakukan pada Triwulan IV 2022 adalah memaksimalkan kinerja operasi melalui matra udara (*airborne surveillance*) yang diintegrasikan dengan armada kapal pengawas. Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data valid yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan telah memiliki target operasi yang jelas karena sudah divalidasi oleh pesawat patroli udara.

Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Triwulan III 2022

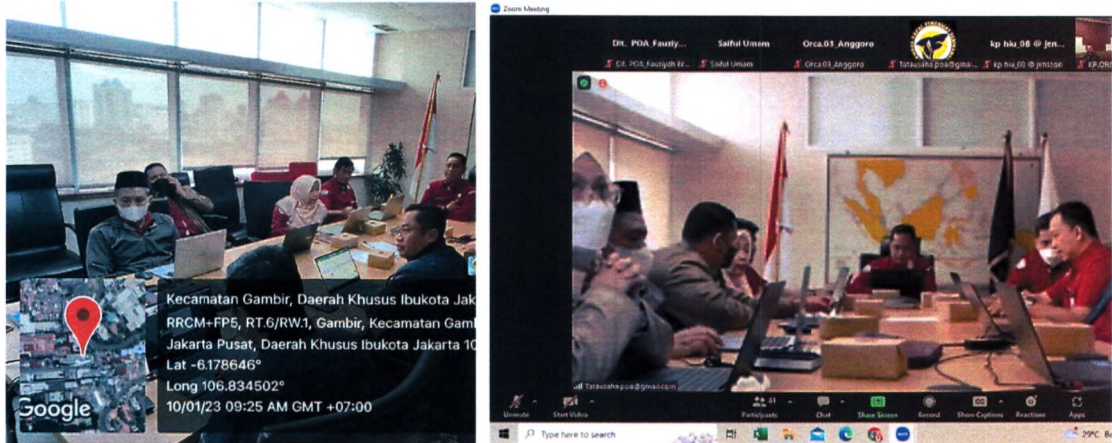
Dalam rangka melakukan rekomendasi pada dokumen Laporan Kinerja periode Triwulan III 2022, telah dilakukan beberapa tindaklanjut yaitu:

1. **Rekomendasi Tindak Lanjut 1:** Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pertama, Direktorat POA telah Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan, Direktorat POA Gedung Mina Bahari IV, lantai 12 Jakarta Pusat. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Konfirmasi capaian kinerja pada 7 indikator kinerja utama dan 11 indikator kinerja generik yang dilakukan pengukuran;

2. Pemeriksaan data dukung pada 18 indikator yang dilakukan pengukuran;
3. Konfirmasi Realisasi anggaran;
4. Pembahasan kendala dan tindaklanjut capaian kinerja



Gambar 4. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Tahun 2022

2. **Rekomendasi Tindak Lanjut 2:** Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi kedua, Direktorat POA telah Melakukan rapat khusus pada periode triwulan IV 2022 untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan, Direktorat POA Gedung Mina Bahari IV, lantai 12 Jakarta Pusat. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Konfirmasi capaian kinerja pada 7 indikator utama dan 11 indikator tambahan yang dilakukan pengukuran;
2. Pemeriksaan data dukung pada 18 indikator yang dilakukan pengukuran;
3. Konfirmasi Realisasi anggaran;
4. Pembahasan kendala dan tindaklanjut capaian kinerja.



Gambar 5. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Tahun 2022

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan,
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2022 sebanyak 18 IKU, Target pencapaian untuk periode Tahun 2022 sebanyak 18 IK/IKU, Dari target 18 IKU/IK tersebut sebanyak 18 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<p>a) Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>b) Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.</p>	<p>a) Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.</p> <p>b) Melakukan rapat khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024.</p>